BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahan bakar minyak (BBM) merupakan komoditas penting yang memiliki peran strategis dalam perekonomian dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Di banyak negara, termasuk Indonesia, BBM bersubsidi menjadi bagian penting dari kebijakan energi nasional untuk membantu mengurangi beban biaya hidup masyarakat dengan memberikan subsidi pada harga jual eceran BBM tertentu. Subsidi BBM ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak fluktuasi harga minyak dunia yang dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan inflasi.

Pasal 33 Ayat (3) dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pemanfaatan sumber daya bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan tugas tersebut, pemerintah memiliki kewajiban mengelola kekayaan alam dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Indonesia, sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk beragam energi, mineral, minyak, dan gas (migas) yang tersebar di berbagai wilayah propinsi (UUD, 1945).

Berlandaskan konsep tersebut, Negara memiliki kendali atas minyak dan gas bumi, dan pengertian "menguasai" berarti pemerintah atas nama Negara mengendalikan seluruh hak yang terkait dengan sumber daya migas, termasuk hak

milik (property right), hak untuk menggunakan (mening right), dan hak untuk menjual (*economic right*) (Rudi, 2000).

Namun, pelaksanaan kebijakan subsidi BBM tidak selalu berjalan mulus dan menghadapi tantangan yang kompleks, terutama di wilayah-wilayah dengan karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang khusus. Salah satu contohnya adalah Kota Batam, sebuah kota dengan wilayah kepulauan yang merupakan bagian penting dari kawasan industri dan perdagangan internasional di Indonesia. Kondisi geografis yang khas ini membuat distribusi dan penyediaan BBM bersubsidi menjadi lebih kompleks dan rentan terhadap gangguan logistik.

Efektivitas pelaksanaan peraturan presiden yang mengatur penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM bersubsidi di Kota Batam menjadi perhatian utama. Evaluasi mendalam diperlukan untuk menilai sejauh mana kebijakan subsidi ini berdampak pada keberlanjutan ekonomi lokal, tingkat keterjangkauan energi bagi masyarakat, dan efisiensi dalam pendistribusian BBM.

Dalam konteks global yang terus berubah, peraturan presiden terkait BBM bersubsidi di Kota Batam juga perlu disesuaikan agar tetap relevan dan berdampak positif dalam jangka panjang. Studi tentang efektivitas implementasi peraturan presiden ini diharapkan akan memberikan wawasan yang berharga bagi pengambilan kebijakan di tingkat lokal dan nasional untuk meningkatkan manfaat dari kebijakan subsidi BBM dan memastikan kelangsungan distribusi energi yang stabil di Kota Batam.

Kota Batam merupakan satu dari enam (6) kota/kabupaten yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), sejak terbentuknya Provinsi Keri pada tahun , kota Batam telah menjadi andalan Provinsi Kepri dalam menunjang perputaran roda perekonomian dan meningkatkan daya saing provinsi dikaca Nasional baik Internasional. Kota Batam juga menjadi kota dengan jumlah penduduk terbanyak se-Provinsi, dengan jumlah penduduk di kota Batam pada September 2020 sebanyak 1,1967 juta jiwa. Ini tidak terlepas dari visi dan misi dalam dibentuknya kota Batam sebagai ujung tombak negara Republik Indonesia yang selalu disandingkan dengan negara tetangga Singapura beserta Malaysia. Tidak hanya menjadi baramometer nasional dalam index pertumubuhan ekonomi, kota Batam telah menjadi lokomotif pertumubuhan ekonomi secara nasional, bertumpu pada keunggulan komparatif sebagai kota perdagangan, jasa dan perindustrian, yang memiliki daya saing secara global dan mampu menjalankan fungsinya secara efisien. Ini terbukti dengan besarnya investasi asing dan jumlah perusahaan nasional serta internasional yang masuk ke kota Batam. Dalam masa pandemi berdasarkan laporan pemerintah daerah, dan asing yang masuk dalam bentuk investasi di kota Batam sebesar $76 juta Dolar Amerika pada tahun 2020 dan $171 juta Dolar Amerika pada tahun 2021. Ini membuktikan bahwa kota Batam masih dipandang sebagai kota yang representatif secara nasional dan internasional.

Menjadi kota yang menopang sebagian besar roda perekonomian Provinsi Kepulauan Riau, serta diera industri 4.0 ketergantungan akan minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategies dalam menyokong stabilitas dan penggerak

perputaran roda perekonomian suatu negara sangam susah untuk dapat dipisahkan. Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara, serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak. Begitu pentingnya peranan minyak dan gas bumi dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahtraan rakyat. Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik di negara-negara miskin, negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang berstatus negara maju sekalipun.

Walaupun adanya inisiatif negara-negara berkembang dalam meninggalkan minyak dan gas bumi, dengan berfokus kepada teknologi yang memanfaatkan sumber daya alam tergantikan. Akan tetapi eksploitasi dan ketergantungan akan minyak dan gas bumi masih menjadi sumbangsih terbesar dalam penggerak ekonomi suatu negara, tidak terlepas Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan cadangan minyak serta gas bumi mentah terbesar di dunia.

Menjadi negara dengan cadangan minyak serta gas bumi mentah terbesar di dunia, tidak membuat ketergantungan atas kebutuhan minyak serta gas bumi dalam negeri berada diposisi nyaman. Sebagian besar kebutuhan minyak serta gas bumi, terkhususnya kebutuhan BBM dalam negeri masih ditopang oleh kekuatan impor. Kekayaan alam yang dimiliki bumi Indonesia membuat pemerintah pada orde baru berkeingan agar seluruh lapisan masyarakat dapat bersama-sama menikmati kekayaan alam tersebut dengan diterbitkannya suatu kebijkan pemerintah terkait subsidi BBM

serta Minyak Tanah. Dengan ditetapkannya kebijakan subsidi BBM secara nasional, masyarakat dapat menikmati BBM bersubsidi dengan haraga jual eceran yang jauh lebih murah ketimbang harga eceran BBM yang mengikuti harga pasar atau yang sering disebut dengan BBM non-Public Service Obligation (non-PSO) yang harganya selalu mengikuti perubahan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP). Adapun harga keekonomian BBM bersubsidi lebih murah ketimbang BBM non-PSO, namun biaya produksi serta biaya angkut terhadaap kedua jenis BBM yang dikeluarkan sangat tinggi tetapi pada waktu orde baru pemerintah Indonesia masih mampu menopang kebutuhan atas BBM bersubsidi itu secara finansial berbeda dengan fenomena yang bersama-sama kita hadapi saat ini dimana terjadi defisit terhadap ketersediaan BBM secara global.

Sejak pemerintah memutuskan kebijakan subsidi BBM, realisasi atas anggaran subsidi energi di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang mana pada saat ini terbagi atas 2 jenis produk yaitu; BBM dan Liquefied Petroleum Gas (LPG), alokasi belanja terhadap subsidi energi cenderung mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya. Setiap tahunnya kita selalu disuguhkan dengan berita kuota BBM bersubsidi yang tidak cukup, bahkan kekurangan atau kelangkaan terhadap BBM bersubsidi sering terjadi sebelum tahun berganti, di tahun 2022 sendiri pemerintah melalui kementrian keuangan telah menaikkan alokasi anggaran untuk subsidi BBM sebesar 3 kali lipat. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan "Pemerintah telah menaikkan anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 sebesar lebih dari 3 kali lipat, yaitu dari Rp152,5 triliun menjadi

Rp502,4 triliun. Besaran subsidi Rp502,4 triliun tersebut tidak cukup hingga akhir tahun karena kenaikan harga internasional dan volume penggunaan yang semakin naik."

Dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya realisasi subsidi BBM selalu melebihi dari total yang telah ditetapkan dalam APBN sehingga menimbulkan kericuhan ditengah-tengah masyarakat dan kondisi ini dapat memperburuk stabilitas keuangan negara yang rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia serta nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama akan dolar Amerika Serikat. Realisasi subsidi BBM di Indonesia yang selalu melebihi jumlah yang telah ditetapkan di dalam APBN seringkali disebut sebagai beban terbesar APBN dan menjadi penyebab utama defisit APBN dari tahun ke tahun.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik mengkaji permasalahan yang terjadi di Kota Batam dengan mengangkat tentang **"Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Presiden Terkait Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Batam"**

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi permasalahan yang penulis kemukakan dalam penelitian ini ialah:

1. Ketidakstabilan Harga Energi: Fluktuasi harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kota Batam menjadi kendala dalam mencapai stabilitas harga

dan daya beli masyarakat. Ketidakpastian harga BBM bersubsidi dapat mempengaruhi anggaran rumah tangga dan daya saing bisnis lokal.

2. Kendala Logistik dan Distribusi: Kondisi geografis kepulauan Kota Batam menyebabkan kendala dalam logistik dan distribusi BBM bersubsidi. Aksesibilitas ke pulau-pulau terpencil, transportasi yang terbatas, dan infrastruktur yang kurang memadai dapat menyebabkan keterlambatan dan ketidakpastian pasokan BBM bersubsidi.
3. Penyalahgunaan Kebijakan Subsidi: Meskipun ada peraturan presiden yang mengatur subsidi BBM, masih ada potensi penyalahgunaan kebijakan ini oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Praktik penimbunan atau penyalahgunaan penggunaan BBM bersubsidi dapat mengakibatkan alokasi sumber daya yang tidak efisien dan merugikan sasaran program subsidi tersebut.

1.3. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas maka penulis membatasi permasalahan antara lain sebagai berikut:

1. Fokus pada Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Presiden: Penelitian ini akan berfokus pada evaluasi sejauh mana peraturan presiden terkait penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM bersubsidi di Kota Batam telah diimplementasikan dengan efektif sesuai dengan tujuan kebijakan subsidi BBM.

2. Lingkup Masalah di Kota Batam: Penelitian ini akan membatasi analisis pada situasi dan kondisi spesifik di Kota Batam. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan subsidi BBM di kota ini akan menjadi fokus utama.
3. Dampak terhadap Masyarakat dan Ekonomi Lokal: Penelitian ini akan mengevaluasi dampak efektivitas pelaksanaan peraturan presiden terkait subsidi BBM di Kota Batam terhadap masyarakat dan ekonomi lokal. Dalam hal ini, fokus penelitian akan berorientasi pada keterjangkauan dan stabilitas harga energi, serta dampaknya terhadap keberlanjutan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dari banyaknya permasalahan, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Presiden terkait penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Batam?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peraturan Presiden terkait penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Batam?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang diuraikan diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Presiden terkait penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Batam?
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peraturan Presiden terkait penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Batam

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat dilihat dari sisi teoritis dan praktis yaitu :

1.6.1. Manfaat Teoritis

1. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literasi, referensi bagi penelitian sejenis dimasa mendatang serta dapat digunakan sebagai tambahan bacaan bagi perpustakaan.
2. Penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memberikan tambahan wawasan bagi masyarakat umum terkait peraturan pemerintah dalam penyediaan, pendistribusian dan harga eceran BBM bersubsidi, serta batasan-batasan pemda dalam menjalankan tugasnya terkait pengawasaan penyediaan dan distribusi BBM bersubsidi di daerahnya masing-masing.

3. Secara akademis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat berkontribusi bagi Univesitas Putera Batam terkhususnya terhadap Program Studi Hukum dan juga bagi mahasiswa/mahsiswi secara umum dalam menjadikan penelitian ini sebagai bahan pendukung ilmiah dan intelektual.

1.6.2. Manfaat Praktis

1. Melalui penelitian diharapkan Masyarakat umum dapat memahami permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh pemda Kota Batam dalam menjalankan tugasnya serta memenuhi kebutuhan masyarakat luas terkait BBM bersubsidi. Diharapkan juga masyarakat dapat beer peran aktif dalam mengawasi pendistribusian BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
2. Kepada mahasiswa diharapkan melalui penelitian ini, mahasiswan dapat lebih kritis dan berperan aktif dalam pengawasan BBM bersubsidi ditengah-tenaga masyarakat.
3. Bagi pemda kota Batam beserta penegak hukum, diharapkan penelitian ini dapat menjadi suatu acuan dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang dalam pengawasaan penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi